

Mahfud MD Akui Sulit Bongkar Mafia karena Dibeking Pejabat

JAKARTA (IM) - Menko Polhukam Mahfud MD sebut bahwa jabatannya memiliki tantangan tersendiri. Salah satunya mafia-mafia yang perlu dibentangi tetapi justru dibeking oleh pejabat.

"Mafia, ya. Mafia peradilan, mafia hukum, ya itu kan tugas saya," kata Mahfud dalam tayangan 'Podkabs' di YouTube Sekretariat Kabinet RI, dikutip pada Kamis (1/6).

Ia menyebutkan banyaknya mafia yang harus dibentangi dari mafia hukum hingga mafia kekayaan alam. Para mafia-mafia ini cukup sulit dibentangi karena ada pula yang di-'back up' oleh sesama pejabat.

"Terutama kalau mafia-mafia kekayaan alam ya, mafia tambang, mafia apa itu, karena terkadang itu tercampur antara orang ingin berusaha baik-baik, orang yang ingin berusaha secara ilegal, bercampur dengan preman,

bercampur dengan back up dari pejabat. Back up dari pejabat," ujarnya.

"Kadangkala kita menyelesaikan masalah itu, 'saya anu dibeking ini, dibeking itu'. Ya tidak takut juga, tapi kan tidak enak gitu ya, kalau saya harus bilang orang sangat penting itu, 'jangan back up gitu dong', gitu misal, bilang ke atasannya, dan seterusnya," imbuhnya.

Mahfud mengakui bahwa kasus-kasus mafia ini cukup sulit ditangani. Dengan demikian, dia mengaku lebih memilih menyampaikan permasalahan atau kasus secara terbuka di publik.

"Bagi saya, itu agak rumit menyelesaikannya. Itulah sebabnya daripada saya bicara berbisik, berdua ingin menyelesaikan, saya lebih baik bicara terbuka agar orang tidak bisa menghindar," katanya. ● han

TNI Baku Tembak dengan KKB, Pangdam: Mugi Masih Terkendali

JAYAPURA (IM) - Pangdam XVII Cenderawasih, Mayjen TNI Izak Pangemanan, sebut belum mendapat laporan kontak tembak yang terjadi di Mugi, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.

"Sampai saat ini saya belum menerima laporan adanya kontak tembak yang terjadi di Mugi, Selasa (30/5)," kata Pangdam Mayjen TNI Izak Pangemanan dilansir dari Antara di Jayapura, Kamis (1/6).

Jenderal Kopassus bintang dua ini menegaskan, saat ini kondisi prajurit di bawah kendali Kodam XVII Cenderawasih dan bertugas di wilayah Nduga sekitarnya masih aman.

Laporan dari semua jajaran hingga Rabu (31/5) aman dan terkendali na-

mun di beberapa wilayah prajurit diminta selalu waspada.

Prajurit yang bertugas di bawah Kodam XVII Cenderawasih adalah Yonif 321/GT dan di Kenyamyang bertugas adalah Yonif 514 SY

"Satuan yang di bawah Kodam XVII Cenderawasih dan bertugas di wilayah Kabupaten Nduga hanya dua batalyon dan bila ada pasukan di luar itu saya tidak mengetahuinya," katanya menegaskan.

Sebelumnya kontak tembak antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dengan prajurit di Mugi terjadi tanggal 15 April hingga menyebabkan lima prajurit meninggal. ● mei

2 | Polhukam

FOTO: ANTARA



MENSOS SERAHKAN BANTUAN UNTUK MASYARAKAT ASMAT Menteri Sosial Tri Rismaharini (kiri) menyerahkan bantuan secara simbolis kepada Bupati Asmat Elisa Kambu (kanan) dan Uskup Agung Agats MGR. Aloysius Murwito (tengah) di Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan, Kamis (1/6). Kementerian Sosial memberikan bantuan pemberdayaan masyarakat di Asmat berupa 27 unit kapal motor, bibit ternak babi, bantuan pakaian, serta penerangan jalan umum tenaga surya.

PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA

Jokowi Ajak Masyarakat Tolak Politik Identitas dan Politisasi Agama

Presiden Jokowi mengatakan, ideologi Pancasila memberikan dampak luar biasa yang membuat kepemimpinan Indonesia diterima dan diakui dunia.

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak masyarakat untuk menolak politik identitas, ekstremisme hingga politisasi agama. Ia mengajak masyarakat untuk saling bertoleransi dan gotong royong.

"Oleh sebab itu, saya mengajak kita semuanya untuk menolak ekstremisme, menolak politisasi identitas, menolak politisasi agama," Jokowi dalam amanatnya pada upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila, di Monas, Jakarta, Kamis (1/6).

Kepala Negara meminta semua pihak menyambut pemilu 2024 dengan kedewasaan, sukacita dan memegang teguh nilai-nilai Pancasila.

"Mari Kita menyambut pesta demokrasi Pemilu 2024 dengan kedewasaan, dengan sukacita, dengan memegang teguh dan nilai-nilai Pancasila, memperjuangkan Indonesia maju yang adil yang sejahtera serta berwibawa di kancah dunia," katanya.

Presiden Jokowi mengatakan bahwa ideologi Pancasila memberikan dampak luar biasa yang membuat kepemimpinan Indonesia diterima dan diakui dunia.

"Presidensi G-20 yang telah sukses dilaksanakan. Keketuan ASEAN tahun ini merupakan bukti nyata bahwa Pancasila bukan hanya utama untuk Indonesia tetapi juga sangat relevan untuk dunia," tutup Jokowi.

RI Tak Bisa Didikte

Selain itu, Presiden Jokowi menyampaikan Indonesia merupakan negara besar yang harus duduk sejajar dengan negara lain. Presiden ingin Indonesia dapat bekerja sama dan menjadi jembatan perbe-

daan dunia.

"Sebagai negara besar Indonesia harus duduk sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Kita siap bekerja sama, siap memimpin, kita ingin bekerja sama kita ingin berkolaborasi dengan negara manapun. Dan menjadi titik temu serta jembatan dari perbedaan-perbedaan yang ada di dunia," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan bahwa Indonesia tidak bisa didikte oleh siapapun. Indonesia selalu siap berkontribusi untuk dunia.

"Inilah Indonesia, In-

donesia adalah Indonesia yang tidak dapat didikte oleh siapapun, yang tidak dapat didikte oleh negara manapun. Namun siap selalu siap berkontribusi bagi dunia," tegasnya.

Jokowi mengatakan ideologi Pancasila membuat kepemimpinan Indonesia diterima dan diakui dunia. "Presidensi G-20 yang telah sukses dilaksanakan. Keketuan ASEAN tahun ini merupakan bukti nyata bahwa Pancasila bukan hanya utama untuk Indonesia tetapi juga sangat relevan untuk dunia," ungkapnya. ● mar

Megawati Kumpulkan Kader PDI-P yang Jadi Kepala Daerah Se-Bali

JAKARTA (IM) - Ketua Badan Pemantauan Pemilu (Bappilu) PDI-P Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul yakin bahwa surat undangan Gubernur Bali, I Wayan Koster terhadap sejumlah kepala daerah se-Pulau Dewata, ditujukan kepada kepala daerah yang merupakan kader PDI-P.

Jika demikian, menurut Pacul, menjadi wajar pertemuan itu merupakan arahan langsung dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Ah kalau Bu Mega terhadap Pak Koster itu kan karena beliau Ketum dan dia (Koster) Ketua DPD. Begitu loh. Jadi hirarkinya agak beda," kata Pacul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (31/5). "Saya kira bupati yang diundang juga Bupati PDI begitu loh. Kalau bukan PDI pasti enggak lah," katanya.

Perlu diketahui, Koster menyurati para kepala daerah itu dengan kop surat Gubernur Bali dengan nomor B.00.005/22300/SEKRET. Tujuan pertemuan untuk membahas perilaku wawatan mancanegara di Bali yang kerap melanggar aturan. Pertemuan dilakukan pada Rabu (31/5), sesuai perintah Megawati.

Pacul memastikan bahwa seluruh kepala daerah yang diundang dalam pertemuan itu adalah kader PDI-P. Dia menilai tak mungkin jika kepala daerah dari kader partai lain bakal hadir dalam pertemuan itu.

"Kalau Bambang Pacul di Jawa Tengah sana yang

Bupati misalnya Golkar, kan mana bisa saya undang. Begitu loh. Itu kan kader partai lain," ucapnya.

"Tapi kalau bupati-bupati PDI pokoknya saya mengundang dia dong. Saya ketua DPD sana. Clear ya," sambung Pacul.

Diberitakan sebelumnya, sebuah tangkapan layar surat undangan rapat dari Gubernur Bali I Wayan Koster kepada wali kota dan bupati se-Pulau Dewata, beredar di media sosial.

Dalam surat itu disebutkan, Koster mengundang wali kota dan bupati di wilayahnya untuk membahas mengenai ulah para Warga Negara Asing (WNA) nakal, sesuai arahan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri.

Koster membenarkan adanya surat undangan rapat yang diteken pada 27 Mei 2023 dan ditujukan kepada seluruh kepala daerah se-Bali itu. Ia mengatakan arahan tersebut sebagai bentuk keprihatinan Megawati Soekarnoputri terhadap kondisi kepariwisataan Bali yang menjadi sorotan beberapa waktu belakangan.

"Ya benar karena beliau (Megawati Soekarnoputri) sangat serius perhatian terhadap kepariwisataan Bali. Tapi surat ini tidak boleh beredar," kata Koster kepada wartawan melalui WhatsApp, Selasa (30/5). ● han

FOTO: ANT



SOSIALISASI PEMILU DI PALU

Sejumlah pelajar mengikuti sosialisasi pemilu di Taman Nasional di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (1/6). Kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut merupakan rangkaian Kirab Pemilu untuk mensosialisasikan tahapan pemilu kepada masyarakat termasuk pelajar sebagai pemilih pemula.

TPPO Marak, Migrant Care Minta Pemerintah Benahi Masalah TKI

JAKARTA (IM) - Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo, meminta pemerintah serius menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang makin masif terjadi.

Keseriusan ini dimulai dengan membenahi masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya korban TPPO negara blok Asia Tenggara. Tingginya korban TPPO bahkan menjadi bahasan serius dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN.

"Saya kira dalam konteks ini memang pemerintah harus benar-benar serius untuk menangani masalah ketenagakerjaan, karena ternyata Kartu Prakerja tidak menjawab persoalan, UU Cipta Kerja makin memperburuk situasi seperti itu," kata Wahyu Susilo saat dihubungi wartawan, Rabu (31/5).

Upaya yang bisa dilakukan pemerintah adalah penyiapan lapangan kerja di dalam negeri dan peningkatan kesejahteraan di ekonomi. Keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri dapat mencegah para pekerja migran (PMI) mencari kerja di luar negeri secara ilegal.

"Mereka nekat kerja ke

luar negeri karena kondisinya lapar kerja. Pasca pandemi banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga pekerjaan dengan risiko apapun bisa diambil," beber Wahyu.

"Jadi memang penyiapan lapangan kerja atau upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi harus dilakukan dan konkret dirasakan," katanya.

Wahyu setuju dengan langkah Presiden Joko Widodo merestrukturisasi kelembagaan satgas TPPO agar lebih mampu berperan memerangi perdagangan orang. Di sisi lain, pemerintah perlu memaksimalkan modalitas yang sudah dimiliki, yaitu penerapan UU TPPO dan kebijakan nasional usai TPPO diangkat menjadi salah satu isu di KTT ASEAN.

"Gugus tugas anti-trafficking, terutama aparat penegak hukum, harusnya memang benar-benar bekerja serius, sehingga ada akses keadilan yang dirasakan oleh korban. Karena selama ini yang terjadi adalah impunitas atau kejahatan tanpa penghukuman," jelas Wahyu. ● mei

KPK Perpanjang Masa Penahanan Pengacara Lukas Enembe 40 Hari

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Advokat Stefanus Roy Rening (SRR). Pengacara Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe tersebut diperpanjang masa penahannya hingga 40 hari ke depan.

"Tim penyidik telah memperpanjang masa penahannya untuk 40 hari ke depan sampai dengan 7 Juli 2023 di Rutan KPK pada Mako Puspomal TNI," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Kamis (1/6).

Masa penahanan Stefanus Roy Rening diperpanjang karena tim penyidik KPK masih butuh waktu untuk melengkapi berkas kasus dugaan merintangi penyidikan perkara Lukas Enembe.

"Masih berlangsungnya pengumpulan alat bukti un-

tuk membuat terang dugaan perintangannya yang dilakukan tersangka SRR," kata Ali.

Stefanus Roy Rening ditetapkan sebagai tersangka obstruction of justice atau merintangi penyidikan Lukas Enembe. Roy Rening diduga menggunakan cara-cara yang melanggar hukum dalam membantu proses hukum Lukas Enembe.

Roy Rening diduga dengan sengaja membuat skenario untuk menghambat proses penyidikan Lukas Enembe. Di antaranya, menyarankan kepada para saksi di kasus Lukas untuk tidak hadir memenuhi panggilan KPK.

Kemudian, Roy Rening juga diduga memerintahkan salah satu saksi agar membuat testimoni dan pernyataan yang berisi cerita tidak benar alias bohong terkait kronolo-

gis peristiwa dalam perkara Lukas Enembe.

Tujuannya, untuk menggalang opini publik sehingga sangkaannya yang ditunjukkan oleh KPK terhadap Lukas dan pihak lain yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dinarasikan sebagai kekeliruan.

Stefanus Roy Rening diduga juga menyarankan dan mempengaruhi para saksi agar tidak menyerahkan uang sebagai pengembalian atas dugaan hasil korupsi yang sedang diselesaikan KPK. Para saksi tersebut kemudian menurut perintah Roy Rening.

Atas tindakan Stefanus Roy Rening itu, proses penyidikan perkara yang dilakukan tim penyidik KPK secara langsung maupun tidak langsung terhadap Lukas Enembe menjadi terhambat. ● han



UPACARA HARI LAHIR PANCASILA DI PAPUA

Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Sekda Papua Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Suzana Wanggai (kiri) menggantikan Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua Muhammad Ridwan sebagai inspektur upacara Hari Lahir Pancasila di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Kamis (1/6). Upacara tersebut bertepatan dengan Gotong Royong Membangun Peradaban dan Pertumbuhan Global.

PENGUMUMAN
Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat (Sirkuler) PT. LAUT SELATAN SHIPPING, berkedudukan di Jakarta Barat, yang telah dituangkan dalam akta tanggal 31 Mei 2023 No.71, diberitahukan bahwa para pemegang saham perseroan telah sepekat membubarkan perseroan karena tidak adanya kegiatan usaha perseroan dan menunjuk Direksi sebagai Likuidator.
Demikian diberitahukan kepada seluruh pihak yang berkaitan harap menghubungi Direksi Perseroan dalam waktu 14 hari sejak pengumuman ini.
Jakarta, 31 Mei 2023
Tertanda
Direksi

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
Direksi perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat yang akan diselenggarakan pada:
Hari/tanggal : Rabu, 21 Juni 2023
Waktu : 10.00 s/d 12.00 WIB
Tempat : Jl. HR Rasuna Said Kav B/29, Jakarta Selatan
Agenda:
- Pengangkatan Kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
- Merubah Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha
- Peninjauan Modal Dasar dan Modal Disetor Perseroan
- Merubah Tempat Kedudukan Perseroan
- Perubahan Alamat Perseroan
Jakarta, 02 Juni 2023
PT. SINAR SELATAN LIMITED